KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Konversi LPG ke CNG, solusi praktis kurangi ketergantungan impor
Tanggal : Jumat, 08 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Konversi LPG Ke CNG

Solusi Praktis Kurangi Ketergantungan Impor

ANGGOTA Komisi XII DPR Syafruddin mendukung rencana konversi Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi ke Compressed Natural Gas (CNG). Agar program ini sukses, dia meminta Pemerintah mengutamakan kesiapan infrastruktur dan jaminan keselamatan. Dengan begitu, transisi energi ini berjalan lancar tanpa memunculkan persoalan baru di masyarakat.

Syafruddin menjelaskan, efisiensi fiskal dari konversi energi itu diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp 137 triliun. Namun, kendala distribusi masih jadi tantangan besar sehingga Pemerintah tidak perlu terburu-buru merealisasikan kebijakan tersebut sebelum memastikan rantai pasok energi siap merata dari hulu sampai hilir secara nasional.

Dia meminta Pemerintah memastikan infrastruktur benar-benar siap sebelum konversi dilakukan di seluruh daerah di Tanah Air. Apalagi, CNG memiliki rantai pasok jauh lebih kompleks dibanding LPG karena menggunakan tabung bertekanan tinggi. "Tanpa kesiapan sarana, distribusi energi bagi masyarakat berpotensi tidak merata," katanya, Kamis (7/5/2026).

Selanjutnya, Syafruddin memberi perhatian khusus pada aspek keselamatan kerja dan perlindungan bagi konsumen rumah tangga dalam program tersebut. Secara teknis, CNG disimpan dalam tekanan 200 hingga 250 bar yang jauh lebih tinggi dibanding LPG. Kondisi itu membuat standar keamanan tabung dan instalasi rumah tangga harus diterapkan secara sangat ketat.

Keselamatan masyarakat, lanjutnya, merupakan hal wajib dan harus jadi prioritas utama dalam setiap tahapan kebijakan energi nasional. Terlebih, bahan bakar seperti CNG memerlukan standar keamanan jauh lebih tinggi dibanding penggunaan biasa sehari-hari. Jangan sampai kebijakan ini justru memunculkan risiko baru bagi konsumen rumah tangga di berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan besar akan membebani proses distribusi energi secara logistik nasional. Karena itu, cadangan gas baru di Kalimantan Timur harus dapat diakses secara adil oleh masyarakat.


FOTO: DPR.GO.ID

Syafruddin

"Pemanfaatan sumber daya alam jangan sampai hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu," ujarnya.

Syafruddin menyebut, tantangan geografis yang cukup besar itu membuat tidak semua wilayah memiliki akses mudah terhadap jaringan gas yang tersedia saat ini. Karena itu, Pemerintah diminta melakukan kajian menyeluruh agar kebijakan konversi energi tidak menciptakan ketimpangan akses bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah.

Selama ini, lanjutnya, CNG telah digunakan secara terbatas pada sektor komersial seperti industri maupun layanan perhotelan di sejumlah wilayah. Namun, penerapan untuk skala rumah tangga nasional memerlukan kesiapan teknologi tinggi serta perlindungan konsumen lebih ketat. Keamanan sistem distribusi juga harus dipastikan sebelum diterapkan lebih luas kepada masyarakat.

Dia meminta Pemerintah tidak hanya mengejar penghematan anggaran namun mengabaikan sistem keamanan bagi masyarakat pengguna energi tersebut. Semua aspek teknis harus dihitung secara matang agar proses transisi energi berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan baru. "Fokus utama adalah menghadirkan energi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat luas," ucapnya.

Anggota Komisi XII DPR Yulisman menambahkan, pengembangan CNG jadi solusi transisi energi yang realistis untuk mengurangi impor LPG nasional. Karena Indonesia memiliki cadangan gas domestik cukup besar yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Gas itu juga jadi alternatif efisien karena seluruh pasokannya berasal dari sumber energi dalam negeri.

Dia menjelaskan, penggunaan gas domestik lebih hemat secara ekonomi dibanding LPG impor yang membebani kas negara setiap tahun. Skema itu juga bisa mengurangi beban subsidi energi dalam APBN melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Potensi penerapan CNG disebut sangat besar terutama di wilayah penghasil gas bumi nasional.

Yulisman mencontohkan India, Pakistan, dan Argentina yang telah berhasil mengembangkan CNG guna menekan impor energi nasional mereka. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi sektor energi secara signifikan dalam jangka panjang. "Tantangan utamanya ada pada pemerataan distribusi agar menjangkau masyarakat dan juga sektor usaha," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kebutuhan LPG nasional saat ini mencapai 8,6 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri baru berada pada kisaran 1,6 hingga 1,7 juta ton. Selain CNG, Pemerintah juga mengkaji DME berbasis batu bara guna mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. ■ PYB